



RENCANA STRATEGIS

BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020--2024



REVISI
2023

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0272/I/PR.00.02/2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2020—2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2020—2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024, yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini.

KEDUA : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan dokumen Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk periode 1 (satu) tahun.

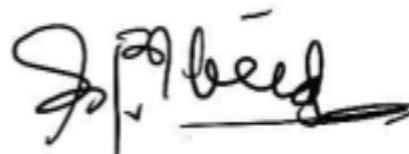
KEEMPAT : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk penetapan Rencana Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024.

- KELIMA : Seluruh unit kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 yang telah dituangkan dalam Renja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- KEENAM : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
- a. terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
 - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA,



E. AMINUDIN AZIZ

KATA PENGANTAR

Syukur ke hadirat Allah Yang Mahapengasih disampaikan atas selesainya penyempurnaan dan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat 2020—2024. Penyempurnaan dan penyesuaian Renstra ini mengacu pada Permen BPN/Bapenas Nomor 5 Tahun 2019, didasarkan pula pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024.

Renstra Balai Bahasa didasarkan pula pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020--2024. Artinya, Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mendukung program kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sesuai moto Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “Badan Bahasa Bermartabat Bermanfaat”, tiga program prioritas (penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan; perlindungan bahasa dan sastra daerah; serta internasionalisasi bahasa Indonesia) dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP).

Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai acuan bagi seluruh staf Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat agar fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Sumatera Barat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan Badan Bahasa, yaitu mendukung pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.



Padang, 1 Mei 2023

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva Krisna', written over a white rectangular background.

Dr. Eva Krisna

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1. Capaian Tahun 2015—2019	2
1.1.2 Capaian Tahun 2020—2022	9
1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra BBPSB Tahun 2020—2024	11
1.2 . Potensi dan Permasalahan	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN SASARAN PROGRAM	18
2.1 Visi	18
2.2 Misi	19
2.3 Tujuan	19
2.4 Sasaran Strategis	20
BAB III Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kelembagaan	23
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	23
3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbudristek	23
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ..	26
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	26
3.2 Kerangka Kelembagaan	29
3.3 Reformasi Birokrasi	32
3.5 Pemenuhan Sarana dan Prasarana	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
4.1 Target Kinerja	35

4.1.1.Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020—2021.....	35
4.1.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022—2024.....	36
4.2 Kerangka Pendanaan.....	36
BAB V PENUTUP	39
Lampiran	40

BAB I PENDAHULUAN

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya 28 Oktober 1928, para pemuda, pejuang kemerdekaan sudah memproklamasikan salah satu identitas bangsa, bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yaitu “Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia”. Perlunya bahasa persatuan tidak terlepas dari banyaknya bahasa daerah di Indonesia dan pentingnya bangsa Indonesia menunjukkan jati diri sebagai orang Indonesia dengan adanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa persatuan ini dirasa paling tepat untuk menunjukkan jati diri keindonesiaan dalam masa pergerakan kemerdekaan.

Setelah perjuangan panjang dengan pengorbanan materi, tenaga, pikiran, dan jiwa segenap bangsa Indonesia, kemerdekaan RI bisa diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdampak pula pada posisi bahasa Indonesia. Kestrategisan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam UUD 1945 Pasal 36. Kemudian, pemerintah juga menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa bahasa persatuan dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Di samping sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa komunikasi antardaerah dan antar budaya di Indonesia.

Tidak salah adagium yang menyebutkan, “Bahasa Menunjukkan Bangsa”. Bahasa yang baik biasanya dihasilkan dari pikiran yang baik pula. Pikiran baik biasanya didorong oleh perasaan/hati yang baik. Oleh karena itu, karakter seseorang atau suatu bangsa bisa dilihat dari cara dia berbahasa.

Di sepanjang masa, bahasa berperan sangat menentukan dalam penyampaian pesan. Ketepatan dan kesantunan berbahasa sangat memengaruhi respons yang akan diterima. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bahasa persatuan, tetapi bahasa Indonesia juga dimanfaatkan dalam dunia perdagangan internasional. Keputusan beberapa negara asing untuk memasarkan produknya di Indonesia juga tidak terlepas dari kebijakan mereka menguasai bahasa Indonesia. Begitu juga keinginan orang-orang untuk mengenal kekayaan budaya

Indonesia, mendorong mereka untuk memahami bahasa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari makin banyaknya orang-orang asing mempelajari bahasa Indonesia.

Ada tiga kelompok bahasa yang berlaku dan hidup di Indonesia: bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bahasa daerah sebagai identitas kedaerahan biasanya dipergunakan sebagai sarana komunikasi pada suatu daerah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi antardaerah. Selanjutnya, bahasa asing biasanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang asing dan sarana penyerapan ilmu dari mancanegara.

Keberadaan kita untuk selalu meningkatkan kemampuan diri sendiri dan menguasai ilmu pengetahuan dalam membangun bangsa Indonesia menjadi syarat mutlak dalam mendukung cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, adil, dan makmur. Kebijakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sangat diperlukan dalam mendukung semboyan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Badan Bahasa Bermartabat, Bermanfaat.

Sehubungan dengan itu, pengelolaan dan pengaturan bidang kebahasaan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur dan berkelanjutan. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat diberi tugas untuk melakukan tugas bidang pengembangan, pembinaan, serta perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Sumatera Barat.

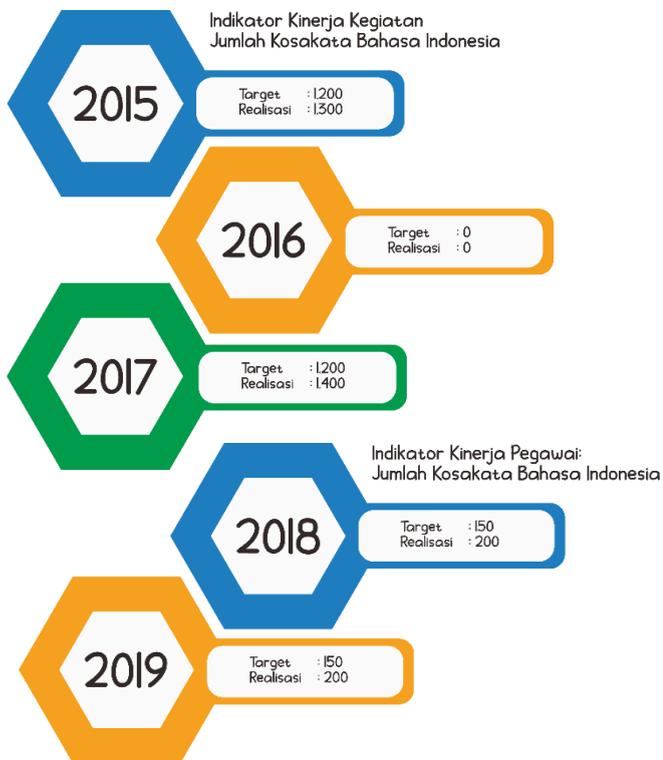
Berikut ini kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1. Capaian Tahun 2015—2019

Merujuk hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan periode 2015—2019 terdapat beberapa kegiatan yang patut dicermati sebagai berikut:

a. Pengumpulan Kosakata Bahasa Daerah untuk Bahasa Indonesia



SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan jumlah mutu dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah

Pada tahun 2015—2019, pengumpulan kosakata bahasa daerah untuk pengayaan bahasa Indonesia tidak terlaksana pada tahun 2016. Jika diamati capaian yang diperoleh untuk pengumpulan kosakata ini melebihi dari target yang ditetapkan.

Selain pengumpulan kosakata untuk pengayaan bahasa Indonesia, bahasa Minangkabau juga terus ditambah entri datanya, hingga 2019 sudah terkumpul sebanyak 27.700 entri. Pada tahun 2021, bahasa Mentawai terkumpul sebanyak 5.000 entri dan bahasa Minang mendapat tambahan entri lagi sebanyak 500 entri. Hambatan yang dihadapi dalam pengumpulan kosakata untuk pengayaan bahasa Indonesia adalah mencari kosakata yang memiliki konsep yang berbeda dari bahasa Indonesia karena bahasa daerah tidak berkembang untuk mendapatkan kosakata arkais. Di samping itu, tim pencari kosakata harus ke pedalaman sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.

b. Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan

Ada dua sasaran kegiatan, yaitu “Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra” dan “Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra”.



SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan

Pada tahun 2015—2019, sasaran strategis tersebut didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan, yaitu “Jumlah Dokumen Kajian Bahasa dan Sastra”. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Kajian Bahasa dan Sastra BBPSB sesuai dengan target yang direncanakan tahun 2015 adalah 1 naskah, tahun 2016 adalah 24 naskah, dan tahun 2017 adalah 24 naskah.

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan

Pada tahun 2019 indikator “Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra” mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan”.

c. Jurnal Ilmiah Salingka

Sasaran Kegiatan untuk Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra BBPSB sesuai dengan realisasi kinerja adalah dua terbitan. Jurnal *Salingka* telah terakreditasi tiga kali berturut-turut dengan prestasi akreditasi 3. Sejak jurnal ilmiah berpindah dalam bentuk daring 2018, *Salingka* sudah tidak mengeluarkan terbitan versi cetak. Pada tahun 2020 tim *Salingka* sudah mengajukan perpanjangan akreditasi, tetapi sampai pertengahan tahun 2021 belum ada pengumuman hasil perpanjangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur organisasi yang mengakibatkan terganggunya proses pengajuan akreditasi jurnal ilmiah di seluruh Indonesia.

d. Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

Kegiatan ini berbentuk sayembara bahan bacaan pengayaan pembelajaran bahasa Indonesia sehingga memunculkan minat menulis bagi masyarakat umum. Dengan demikian, diharapkan meningkat pula minat masyarakat terhadap dunia sastra dan menjadikan penulisan kreatif sebagai jalan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bahasa dan sastra. Keluaran sesuai dengan target BBPSB yang menargetkan tiga bahan dan terealisasi tiga bahan pula. Dari kegiatan ini diharapkan muncul penulis-penulis berbakat dan terciptanya juga tulisan-tulisan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya tulisan-tulisan yang bermuatan lokal.

e. Instrumen UKBI

Sasaran Kegiatan Pelatihan Penyusunan Bahan UKBI adalah Pelatihan Penyusunan Soal-Soal UKBI. Pelatihan ini membawa wawasan baru bagi peserta yang mengikutinya, yaitu timbulnya wawasan dan pengetahuan tentang materi dan penyusunan bahan UKBI yang baik. Peserta juga lebih memahami dan menguasai teknik-teknik pembuatan soal UKBI dari seksi I—III. Kendala yang dihadapi boleh dikatakan dapat diatasi dengan baik. Kendala lain adalah soal waktu kegiatan tersebut yang sebaiknya diperpanjang sehingga peserta lebih maksimal membuat bahan UKBI. Tahun 2019 ini tidak dilaksanakan.

f. Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra

Sasaran strategis ini capaian realisasinya didukung oleh dua indikator kinerja kegiatan, yaitu “Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra” dan “Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra”. Pada tahun 2015—2017 tidak ada indikator kinerja kegiatan. Sementara itu, hasil pengukuran kinerja pada tahun 2019 sebanyak 1.200 orang yang ditargetkan untuk diikuti dalam kegiatan peningkatan kompetensi kebahasaan dan kesastraan bagi masyarakat di Sumatera Barat dan telah terealisasi sebanyak 100%.

BBPSB telah mencapai target dalam memberikan pembinaan dan peningkatan kompetensi terhadap 1.200 orang masyarakat (siswa/mahasiswa,

sastrawan, dan masyarakat umum), tetapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut masih ditemui beberapa kendala dan hambatan, antara lain medan yang sulit.

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra” juga dalam bentuk kegiatan “Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra”. Kegiatan Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra tahun 2019 adalah 2.432 orang sesuai dengan realisasi kinerja tahun 2019. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah seringnya kegiatan yang bertepatan dengan ujian siswa.

Capaian indikator “Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
		Target	Realisasi
Meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	1.200	1.200

Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2019 sebanyak 1.200 orang yang ditargetkan untuk diikuti dalam kegiatan peningkatan kompetensi kebahasaan dan kesastraan bagi masyarakat di Sumatera Barat telah terealisasi sebanyak 100%.

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra” juga didukung oleh indikator “Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra”. Ketercapaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
		Target	Realisasi
Meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Jumlah generasi muda pengapresiasi Bahasa dan Sastra	2.432	2.432

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah seringnya kegiatan yang bertepatan dengan ujian siswa.

g. Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik yang Terkendali

Kegiatan Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya dan Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya, pada tahun 2015—2017, tidak ada indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator baru terealisasi pada tahun 2019, yaitu tercapainya 100 lembaga dalam kegiatan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dan sudah terealisasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sulitnya mengadakan kerja sama karena kegiatan kadang kala diadakan pada hari libur. Tahun 2019, kegiatan pembinaan Badan Swasta yang Terkendali diarahkan untuk pelaku iklan. Kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik untuk target kinerja 119 lembaga. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengumpulkan pelaku periklanan karena jumlah karyawan perusahaan iklan banyak yang sangat minim dan tidak bisa meninggalkan kantor untuk keperluan pelatihan. Jadi, sulit untuk mengikuti kegiatan karena perusahaan hanya mempunyai satu orang karyawan pada bidang tertentu.

Capaian indikator “Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
		Target	Realisasi
Meningkatkan jumlah ruang publik yang terkendali	Jumlah badan publik yang terkendali penggunaan bahasa	100	100

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasa sesuai target kinerja tahun 2019 adalah 100 lembaga dan sudah terealisasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sulitnya mengadakan kerja sama karena kegiatan kadang kala diadakan pada hari libur.

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali” juga didukung oleh indikator “Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya”. Ketercapaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
		Target	Realisasi
Meningkatkan jumlah ruang publik yang terkendali	Jumlah badan swasta yang terkendali penggunaan bahasanya	100	119

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasa pada kegiatan ini berupa penyuluhan untuk pelaku iklan. Kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik untuk target kinerja 119 lembaga. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengumpulkan peserta dari periklanan karena karyawan pada perusahaan iklan jumlahnya sangat terbatas. Jadi, sulit untuk mengikuti kegiatan karena perusahaan hanya mempunyai satu orang karyawan.

h. Mutu dan Jumlah Bahan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Pada tahun 2018 sasaran kegiatan adalah Pemelajar BIPA. Pada tahun 2015—2017, indikator “Jumlah Pemelajar BIPA” mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Akses dan Mutu Pemasarakatan Bahasa dan Sastra di Daerah”.

Jumlah Pemelajar BIPA pada tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak ada karena BBPSB tidak mengadakan kegiatan ini. Kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam melaksanakan kegiatan ini, BBPSB bekerja sama dengan APPBIPA Sumatera Barat. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi dan Pelatihan Pengajar dan Pegiat BIPA. Kegiatan itu bertujuan untuk mempersiapkan tenaga pengajar dan mengoordinasi serta memfasilitasi pengajar dan pegiat BIPA Sumatera Barat. Kendalanya adalah orang asing yang mengunjungi Sumatera Barat sebagian besar dalam durasi singkat. Kendala lain adalah soal biaya, SDM, dan koordinasi narasumber sebagai tenaga pengajar pada pelatihan BIPA masih berasal dari Pulau Jawa.

Sementara itu, bimtek bahan ajar BIPA dilaksanakan untuk memberikan tambahan wawasan tentang BIPA kepada tim BIPA di satuan kerja. Kegiatan ini berisi pemaparan tentang strategi pengembangan program BIPA di daerah dan beberapa materi teknis, seperti pengajaran dan penyusunan bahan ajar. Pembinaan jejaring BIPA dimaksudkan untuk membentuk sinergi antarpegiat BIPA di Sumatera

Barat. Pegiat BIPA tersebut terdiri atas lembaga maupun perorangan. Dengan adanya jejaring kerja, diharapkan pelaksanaan program BIPA di Sumatera Barat menjadi lebih efektif.

1.1.2 Capaian Tahun 2020—2022

Pada periode 2020—2021, terdapat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target kinerja sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
			2020	2021
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	dokumen	1	-
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosak Kata Bahasa Indonesia	kosakata	500	500
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	orang	900	704
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	lembaga	230	258
Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puhah	orang	60	-
	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puhah	orang	80	23

Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	predikat	BB	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	nilai	91	91

Target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020—2021 tercapai sesuai target renstra dan PK. Pada periode 2022, terdapat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target kinerja sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
			2020
Tersedianya produk pengembangan Bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	878
Terbinanya Lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah Lembaga yang terbina pengguna bahasanya	lembaga	34
	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	15
Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	55
Tersedianya produk diplomasi Bahasa	Jumlah produk penerjemah	produk	4

Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipasi perlindungan Bahasa dan sastra daerah	orang	22
Meningkatnya tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat		BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas palaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat		91

Tahun 2022 semua target renstra tercapai sesuai dengan PK.

1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra BBPSB Tahun 2020—2024

Rencana strategis BBPSB Tahun 2020—2024 diubah sesuai dengan regulasi terbaru di tingkat pusat. BBPSB sebagai instansi di daerah tentunya mengacu pada perubahan atau revisi renstra ini sesuai dengan renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Perubahan atau revisi renstra BBPSB itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Struktur	Renstra	
	(Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Semula	Menjadi
1	BAB I Pendahuluan		
	1.1 Kondisi Umum	Capaian 2015--2019	1. Capaian 2015—2019 2. Capaian 2020—2022
	1.2 Pokok-Pokok Perubahan	Tidak Ada	Ada
	1.3 Permasalahan dan Potensi	Hanya penjelasan permasalahan dan potensi	Permasalahan dan potensi diuraikan berdasarkan analisis SWOT.
2	BAB II Visi, Misi, dan Tujuan		
	a	Mencantumkan visi BPP Bahasa	Visi merupakan turunan dari visi BPP Bahasa.
	b	Mencantumkan misi BPP Bahasa	Misi merupakan turunan dari misi BPP Bahasa.

		c	Mencantumkan tujuan BPP Bahasa	Tujuan merupakan turunan dari tujuan BPP Bahasa.
		d	Sasaran strategi dan sasaran program belum diturunkan dari IKU.	Sasaran strategi dan sasaran program sudah diturunkan dari IKU.
3	BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan			
		a	Arah kebijakan dan strategi belum mengacu ke BPP Bahasa.	Arah kebijakan dan strategi sudah mengacu ke BPP Bahasa dan sudah ditambahkan program dan prioritas BBPSB
		b	Kerangka Regulasi	Tidak berubah
		c	Kerangka kelembagaan belum terdapat pengelolaan SDM dan pemenuhan sarana/prasarana.	Kerangka kelembagaan sudah mencantumkan pengelolaan SDM dan pemenuhan sarana/prasarana.
4	BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
		a	Target kinerja	Target kinerja dan program tahun 2022—2024 mengacu pada IKU
		b	Kerangka pendanaan	Tidak berubah
5	BAB V Penutup			
			Penutup	Tidak berubah
6	Lampiran			
			Belum ada <i>cascading</i> , belum ada matriks perubahan	Sudah ada <i>cascading</i> dan matriks perubahan

1.2. Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan yang terbagi dalam faktor internal (dari dalam BBPSB) dan faktor eksternal (dari luar BBPSB) dilakukan melalui analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*),

dan ancaman (*threats*). Terdapat 25 faktor internal dan eksternal yang merupakan potensi dan permasalahan di BBPSB. Keseluruhan faktor itu dapat dilihat berikut ini.

A. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) BBPSB merupakan lembaga satu-satunya di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan/pengelolaan bahasa dan sastra.
- b) Adanya dukungan dalam bentuk landasan hukum (regulasi) yang lengkap terkait kebahasaan dan kesastraan.
- c) Terdapatnya SDM dalam memberikan pelayanan kebahasaan dan kesastraan yang terqualifikasi oleh BPP Bahasa.
- d) Tersedianya produk kodifikasi dalam bentuk kamus Bahasa Minangkabau-Indonesia cetak dan digital serta kamus Bahasa Mentawai-Indonesia cetak.
- e) Tersedianya produk terjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia sebagai bahan pengayaan literasi di Provinsi Sumatera Barat.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang cukup memadai.

2) Kelemahan

- a) Jumlah SDM yang masih terbatas untuk memenuhi pelayanan lembaga kepada masyarakat pengguna.
- b) SDM dalam pengajaran program BIPA belum ada.
- c) Implementasi regulasi bidang kebahasaan dan kesastraan yang belum berjalan dengan baik.
- d) Semua produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan belum maksimal dimanfaatkan oleh lembaga atau masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
- e) Data kebahasaan dan kesastraan yang belum terdata dengan baik.

B. Faktor Eksternal

1) Peluang

- a) Respons positif dalam mendukung program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat.
 - b) Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang cukup tinggi merupakan aset berharga dalam upaya menyelaraskan program-program terkait kebahasaan dan kesastraan.
 - c) Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat dapat dijadikan sebagai media dalam penyebarluasan informasi dan layanan kebahasaan dan kesastraan.
 - d) Banyaknya akademisi, sastrawan, dan budayawan yang mendukung setiap program kebahasaan dan kesastraan.
 - e) Banyak pegiat dan komunitas literasi dalam meningkatkan budaya literasi di Sumatera Barat.
 - f) Masyarakat yang dapat dilibatkan dalam upaya penyebarluasan informasi kebahasaan dan kesastraan, khususnya para generasi muda yang terpilih melalui program Duta Bahasa Sumatera Barat.
 - g) Banyaknya masyarakat yang meminta layanan bidang bahasa dan hukum di Sumatera Barat.
 - h) Perpanjangan tangan dalam pelayanan UKBI di daerah.
- 2) Ancaman
- a) Jumlah bahasa daerah yang terbatas mengakibatkan sulitnya melakukan pengayaan kosakata ke dalam bahasa Indonesia.
 - b) Belum menjadikan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah di Sumatera Barat sebagai prioritas utama oleh para pemangku kepentingan.
 - c) Terbatasnya akses menuju daerah 3T, khususnya Kepulauan Mentawai, menyebabkan sulitnya menjangkau wilayah tersebut hingga ke pelosok.
 - d) Belum adanya regulasi khusus (peraturan daerah) dalam penggunaan bahasa di lembaga swasta.
 - e) Sikap positif penutur bahasa Indonesia di Sumatera Barat belum tinggi dan masih rendah.

- f) Penggiat bahasa dalam lingkup pemasyarakatan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia/daerah belum terdata dengan baik.

Internal Factors analysis Summary/EFAS

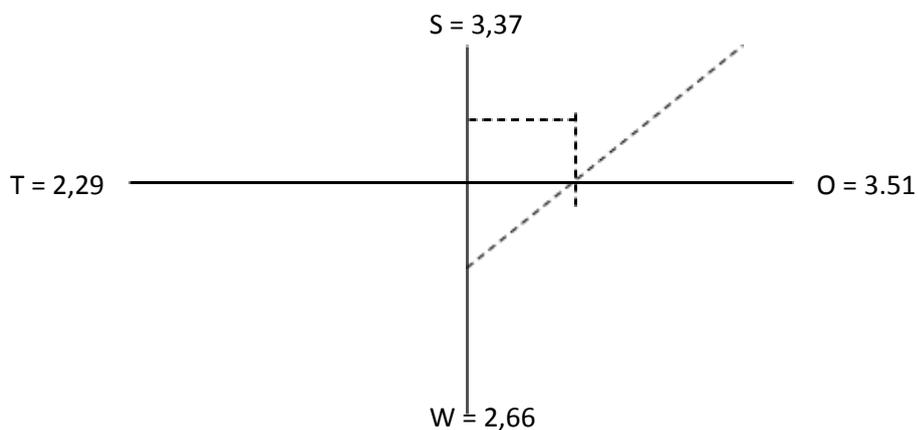
<i>IFAS</i>	Bobot	Rating	Skor	Ket.
Kekuatan				
1	0,2	4	0,8	
2	0,2	4	0,8	
3	0,3	3	0,39	
4	0,2	3	0,6	
5	0,13	3	0,39	
6	0,13	3	0,39	
Sub. Total Kekuatan			3,37	
Kelemahan				
1	0,222	3	0,666	
2	0,333	3	0,666	
3	0,111	3	0,333	
4	0,222	3	0,666	
5	0,111	3	0,333	
Sub. Total Kelemahan			2,664	
Total			6,034	

Matrix External Factors Analysis Summary/EFAS

<i>EFAS</i>	Bobot	Rating	Skor	Ket.
Peluang				
1	0,105	3	0,35	
2	0,105	3	0,315	
3	0,158	4	0,632	
4	0,158	4	0,632	

5	0,158	4	0,632	
6	0,105	3	0,315	
7	0,105	3	0,315	
8	0,105	3	0,315	
Sub. Total Peluang			3,506	
Ancaman				
1	0,143	3	0,429	
2	0,143	2	0,289	
3	0,214	3	0,429	
4	0,214	3	0,429	
5	0,143	2	0,286	
6	0,143	3	0,429	
Sub. Total Ancaman			2,291	
Total			5,797	

Setelah ditentukan faktor internal dan faktor eksternal dilakukan penilaian melalui analisis SWOT. Dari keseluruhan analisis terhadap kedua faktor tersebut didapat hasil atau nilai akhir, yaitu kekuatan sebesar **3,37**, kelemahan sebesar **2,66**, peluang sebesar **3,51**, dan ancaman sebesar **2,29**.



Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dengan memperhatikan hasil analisis SWOT di atas, penentuan faktor kunci keberhasilan pencapaian misi BBPSB dapat ditelusuri. Sehubungan dengan itu, dapat ditelaah potensi prioritas serta permasalahan yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program di BBPSB. Identifikasi masalah yang menjadi prioritas dalam penanganannya dapat dilihat berikut ini.

Permasalahan

1. Jumlah SDM yang masih terbatas untuk memenuhi pelayanan lembaga kepada masyarakat pengguna.
2. Semua produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan belum maksimal dimanfaatkan oleh lembaga atau masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
3. Belum menjadikan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah di Sumatera Barat sebagai prioritas utama oleh para pemangku kepentingan.
4. Belum adanya regulasi khusus (peraturan pemerintah daerah) dalam penggunaan bahasa di lembaga swasta.
5. Implementasi regulasi bidang kebahasaan dan kesastraan yang belum berjalan dengan baik.

Strategi

1. Pengajuan ke BPP Bahasa terkait penambahan jumlah SDM di BBPSB
2. Penguatan layanan dan penyebarluasan produk kebahasaan dan kesastraan BBPSB melalui platform digital
3. Peningkatan kerja sama antarpemangku kepentingan di lingkungan Provinsi Sumatera Barat
4. Perumusan peraturan pemerintah daerah terkait regulasi penggunaan bahasa di Provinsi Sumatera Barat
5. Penguatan implementasi regulasi kebahasaan dan kesastraan di Sumatera Barat dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN SASARAN PROGRAM

2.1 Visi

Visi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat mengikuti visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden.

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra”

Dari rumusan visi di atas dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika bangsa Indonesia mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui

pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat mengikuti misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 5 tahun ke depan yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut;

- Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan

- Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional

- Mewujudkan kelestarian bahasa daerah

4. Mengoptimalkan tata Kelola Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal **pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan.**

Adapun target keberhasilan Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada akhir periode renstra tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nomor	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		
		Indikator	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persentase	72
		Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persentase	91,99
2	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	50
3	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	20,54
4	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

Untuk mendukung pencapaian tujuan, indikator, dan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan
2. Meningkatkan peran bahasa Indonesia di kancah internasional
3. Meningkatkan pelestarian bahasa daerah
4. Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran

2.4 Sasaran Strategis

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Sasaran-sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
[SK2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKK2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
[SK3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
	[IKK3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
[SK4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	[IKK4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
[SK5] Tersedianya produk diplomasi Bahasa	[IKK5.1] Jumlah produk penerjemahan
[SK6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
[SK7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	[IKK7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
	[IKK7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang selaras dengan perubahan rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian tahun 2022—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kode	SK/IKK	Satuan	Target Renstra	
			2022	2023
SK 1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra			
IKK 1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2	2
SK 2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan			
IKK 2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	878	900
SK 3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan			
IKK 3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga	45	45
IKK 3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	15	15
SK 4	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA			
IKK 4.1	Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	55	55
SK 5	Tersedianya produk diplomasi Bahasa			
IKK 5.1	Jumlah produk penerjemahan	produk	4	23
SK 6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah			
IKK 6.1	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	orang	22	23
SK 7	Meningkatnya tata kelola <i>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat</i>			
IKK 7.1	Predikat SAKIP <i>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat</i>	predikat	BB	A
	Indikator pelaksanaan RKA- K/L <i>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat</i>	nilai	91	91

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 adalah: “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri,

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbudristek

Terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbudristek. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut.

No.	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
-----	--------------------	----------------	----------

1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan layanan berkualitas	Pemerataan pendidikan	peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
		- Meningkatkan produktivitas dan daya saing		pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
2.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter		revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk

			menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
		- Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotongroyong, dan kerja sama antarwarga;
			pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
			pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
			pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	peningkatan budaya literasi; pengembangan pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara

Kemendikbudristek dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.
2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan.
3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai ekonomi bahasa dan sastra.
4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud pembinaan bahasa dan sastra.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi berikut ini.

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif di Provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan kualitas praktik pendidikan literasi di masyarakat dengan

dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud pembinaan bahasa dan sastra di Provinsi Sumatera Barat.

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dapat berdiri pada dua bidang, yaitu: bidang pendidikan serta bidang kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat. Pada bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas.

Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, strategi pendidikan, dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama berbagai universitas melalui berbagai aktivitas.

Pada bidang kebudayaan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan: (1) peningkatan budaya literasi; (2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; (3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan (4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan
1.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA
2.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra
3.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Kemasyarakatan	Penjaminan mutu juru bahasa kemasyarakatan, termasuk juru bahasa hukum (pengadilan dan kepolisian)

4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Dengar	Penjaminan mutu juru bahasa isyarat dengar (juru bahasa dapat mendengar)
5.	Peraturan tentang pedoman umum pembentukan istilah	Perlunya kaidah yang baku dalam pembentukan istilah
6.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya
7.	Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
8.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penambahan tarif nol dalam PNBPN UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran pelajar
9.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
10.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia
11.	Peraturan tentang Standar Laboratorium Kebahasaan	Pentingnya aturan mengenai standar Laboratorium Kebahasaan di seluruh Indonesia

12.	Peraturan tentang Pengembangan dan Pelindungan Sastra	<p>Melindungi hak cipta Paten sastra.</p> <p>Perluanya Kebijakan nasional pengembangan dan pelindungan sastra</p> <p>Menjadikan sastra tuan di negeri sendiri, menangkal serbuan sastra asing ke dalam negeri.</p> <p>Meningkatkan fungsi dan peran sastra pada masyarakat secara nasional dan internasional</p> <p>Perlunya pengaturan pemerdayaan khazanah sastra, pengembangan laras sastra, pemantapan dan pembakuan sistem sastra, penerjemahan, penyaduran, pengadaptasian, pengalihwahanaan, pengutipan, dan pengambilan sebagai bahan pembelajaran sastra.</p>
13	Permendikbud tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres Nomor 63 tahun 2019, tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
14	Perda tentang Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di daerah	Pelaksanaan UU No. 24 tahun 2009, dan Pepres No. 63 tahun 2019
15	Perda tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Pelaksanaan PP No. 57 tahun 2014 dan Permendikbud No. 48 tahun 2018

3.2 Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



Untuk memperjelas bagan organisasi, berikut ini tabel penanggung jawab program dan kegiatan beserta kode programnya.

Kode Program	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Direktur Jenderal Kebudayaan
2020	Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2021	Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2022	Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 29 orang ASN dan 9 orang PPNPN. Jumlah Pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan akibat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengharuskan semua pejabat fungsional peneliti berpindah ke BRIN. 5 orang pejabat fungsional peneliti pindah ke BRIN sehingga jumlah ASN semula 34 orang berubah menjadi 29 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural sebanyak 2 orang, yaitu 1 orang kepala dan 1 orang kasubbag umum, 6 orang pejabat fungsional widyabasa, 1 orang pejabat fungsional analis kepegawaian, 5 orang analis kata dan istilah, 4 orang Pengkaji Bahasa dan Sastra, dan 11 orang tata usaha. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat pun memiliki staf dengan berbagai tingkat pendidikan, yaitu S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 9 orang, dan S-1 sebanyak 19 orang (2 orang belum penyesuaian ijazah). Dengan berkurangnya jumlah SDM di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, diperlukan upaya sistematis dalam pengelolaan SDM Aparatur. Secara rinci, kondisi pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama	Gol	Jabatan
1	Dr. Eva Krisna	IV-a	Kepala
2	Wahyudi, M.Hum.	IV-a	Kasubag Umum
3	Herlinda, S.Pd., M.Hum	IV-a	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
4	Diana, M.Pd.	IV-a	Widyabasa Ahli Madya
5	Andriana Yohan, M.A.	IV-a	Widyabasa Ahli Madya
6	Fitria Dewi, M.Hum.	IV-a	Wdyabasa Ahli Madya
7	Imron Hadi, M. Pd.	III-d	Widyabasa Ahli Muda
8	R. Yenny Puspita Sari, S.S.	III-d	Pengkaji Bahasa dan sastra
9	Lismelinda, M.Pd.	III-d	Analisis Kata dan Istilah
10	Tahtaha Darman Moenir, S.S.	III-d	Pengadministrasi Perpustakaan
11	Kartika Sari, S.S.	III-d	Analisis Kata dan Istilah
12	Joni Syahputra, S.S.	III-d	Pengkaji Bahasa dan Sastra
13	Alvi Rianto Putra, S.E.	III-d	Pengelola Data Organisasi dan Tata Laksana
14	Fajril Kamil, S.E.	III-d	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan
15	Ani Lestari Amris, S.Pd.	III-d	Pengkaji Bahasa dan Sastra
16	Krisnawati, S.S., M.Hum.	III-d	Analisis Kata dan Istilah
17	Dini Oktarina, S.Pd., M.A.	III-d	Analisis Kata dan Istilah
18	Arriyanti, S.S.	III-c	Widyabasa Ahli Muda
19	Mutiya Dessri, S.Pd.	III-c	Pengkaji Bahasa dan Sastra
20	Alliati, S.Sos.	III-c	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan
21	Armaini, S.Sos.	III-c	Pengelola BMN
22	Eva Himyati, S.S.	III-c	Analisis Kata dan Istilah
23	Yollanda, S.S.	III-b	Widyabasa Ahli Pertama
24	Arman Jamaan, S.Sos.	III-b	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
25	Janeli Gusti, S.Sos.	III-b	Pengadministrasi Persuratan
26	Nova Suryani, S.A.P.	III-a	Pengelola BMN

27	Afriyeni, S.Sos.	III-a	Bendahara
28	Rina Elfita	II-d	Pengadministrasi Keuangan
29	Fatmawati	II-d	Pengadministrasi Kepegawaian

3.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan sebagai berikut.

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
 - a. layanan satuan pendidikan;
 - b. layanan substansi pendidikan;
 - c. layanan guru dan tenaga kependidikan;
 - d. layanan kebahasaan; dan
 - e. kesastraan.

Untuk mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang berdampak langsung kepada masyarakat sebagai berikut.

1. Gerakan Literasi Nasional

Dalam rangka mendukung literasi, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator Gerakan Literasi Nasional di Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan, antara lain penyediaan buku literasi dan penyusunan pedoman cerita anak. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pembinaan komunitas literasi. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melanjutkan untuk mengirimkan bahan literasi yang lolos penilaian oleh Pusat Perbukuan, melakukan distribusi buku bacaan literasi, serta menerjemahkan judul buku literasi berbahasa daerah.

2. Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra

Pada 2020 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan generasi muda terbina penggunaan bahasa dan sastra. Target sebanyak 700 kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar generasi muda Indonesia lebih bangga dan lebih mengutamakan bahasa Indonesia dari pada bahasa asing. Selain itu generasi muda Sumatera Barat juga harus dapat melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing agar dapat memasyarakatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

3. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Tujuan pengembangan program BIPA dapat ditinjau dari dua perspektif. Dari aspek pedagogi, program BIPA bertujuan meningkatkan dan menjamin mutu hasil dan proses pembelajaran BIPA dalam rangka meningkatkan jumlah penutur asing yang mampu berbahasa Indonesia. Sementara itu, dari perspektif multidimensi (ekstra pengajaran), program BIPA bertujuan (1) memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di dunia internasional, serta (2) meningkatkan kerja sama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggara BIPA.

4. Pengayaan Kosakata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melakukan penambahan jumlah kata dan makna sebanyak 1.000 leksem pada tahun 2020. Penambahan itu dilakukan dengan berbagai kegiatan terkait, seperti Inventarisasi Kosakata. Usulan kosakata dari masyarakat dan pengumpulan kosakata populer yang beredar di masyarakat juga melengkapi kegiatan penambahan jumlah kosakata. Penambahan dilakukan melalui pemutakhiran KBBI yang dilakukan pada April dan Oktober. Pemutakhiran tersebut dilakukan pada KBBI Daring. Masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar dapat melihat rincian pemutakhiran di laman KBBI Daring.

5. Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia

Target peserta yang menjadi sasaran pengujian pada tahun 2020 untuk Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat adalah 2.500 peserta yang terdiri atas 1.500 peserta dari kalangan guru, serta 750 peserta dari kalangan ASN Kemenaker (Perwakilan Asosiasi Profesi), layanan pendidikan, ESDM (peserta ini digolongkan sebagai peserta dalam kegiatan Sosialisasi dan Tes UKBI). Selain itu, sasaran pengujian lainnya adalah peserta berbayar yang terdiri atas 240 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa asing, dan 10 peserta dari kalangan pengajar asing.

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan kerja sama dengan program studi S-2 bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang untuk menjadikan UKBI sebagai salah satu syarat dalam proses pengujian tesis.

6. Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina

Untuk menjenamakan bahasa Indonesia ke dunia internasional secara umum dan Negara Indonesia secara khusus, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat akan terus menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Pada tahun 2020 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat telah menertibkan bahasa di ruang publik pada 250 lembaga.

3.5 Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor tempat kerja utama. Kepemilikan sarana dan prasarana

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat adalah kepemilikan tanah dan bangunan. Pemeliharaan Gedung Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melalui anggaran m RKBMN.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Keberhasilan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat tidak terlepas dari rencana matang yang ditetapkan. Sehubungan hal tersebut, guna mencapai target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan, yakni periode tahun 2020 s.d. 2024, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK). Kemudian untuk memastikan tercapainya SK, ditetapkanlah ukuran keberhasilan pada masing-masing SK dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

4.1.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, terdapat Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta target kinerja sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA	
			2020	2021
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui penelitian	dokumen	1	-
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	kosakata	500	500
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	orang	900	704
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	lembaga	230	258

Terlindungnya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puhah	orang	60	-
	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puhah	orang	80	23
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	predikat	BB	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	nilai	91	92

4.1.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta target kinerja sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA		
			2022	2023	2024
Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2	2	2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	878	900	900
Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga	45	45	45
	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	15	15	15
Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	55	55	55
Tersedianya produk diplomasi Bahasa	Jumlah produk terjemahan	produk	4	23	23
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	orang	22	23	23
Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	predikat	BB	BB	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	nilai	91	91	91

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan pe lindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mengubah struktur program dan kegiatan kementerian/lembaga.

Berkaitan dengan hal di atas, kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tahun 2020—2024 dibagi ke dalam dua periode berikut ini.

Periode Tahun Anggaran 2020—2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (ribuan)	
		2020	2021
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	103.660	115.438
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	0	185.570
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	390.218	769.470
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	390.516	1.060.179
Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	35.000	0
	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	62.110	750.550
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	1.406.327	439.012
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	3.728.745	3.076.044

Periode Tahun Anggaran 2022—2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (ribuan)		
		2022	2023	2024
Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	115.000	118.450	122.004
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	490.618	748.247	794.586
Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	249.254	256.732	264.434
	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	195.500	201.365	207.406
Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	113.043	116.434	119.927
Tersedianya produk diplomasi Bahasa	Jumlah produk penerjemahan	100.000	597.400	615.322
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	128.006	135.933	144.352
Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	1.117.682	1.215.000	1.251.450
	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	4.024.859	3.847.575	3.963.002

BAB V PENUTUP

Sebagai wujud untuk mendukung visi dan misi Presiden RI, setiap kementerian harus membuat Rencana Strategis yang didasarkan pada visi dan misi Presiden RI. Ini artinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus sejalan dan mendukung Restra Kementerian. Selanjutnya Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga harus mendukung program kerja Badan Bahasa. Dengan demikian, secara otomatis, Balai Bahasa turut mendukung secara berjenjang Visi dan Misi Presiden RI.

Dalam Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat terdapat 5 Sasaran Kegiatan yang menjadi pedoman dalam program dan kegiatan tahun 2020--2024 bagi staf Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Kegiatan tersebut: (1) meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia; (2) terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik; (3) meningkatnya penutur bahasa Indonesia yang terbina; (4) terlindunginya sastra yang kritis dan terancam punah; dan (5) meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas. Sasaran Kegiatan ini menjadi acuan dan payung semua kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat lima tahun ke depan.

Besar harapan, Renstra ini bisa menjadi arah, pedoman, dan acuan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Sumatera Barat dan menjadi pendukung program kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada periode 2020—2024.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Kegiatan (SMART)
2. Cascading
3. Matriks Perubahan Indikator Kinerja
4. Definisi Operasional

Indikator Kinerja Kegiatan (SMART)

No.	KKLP	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Specific Spesifik	Measureable Dapat Diukur	Attainable Dapat Dicapai (dengan menggambarkan tantangannya)	Relevant Relevan	Timebound Batas Waktu	Trackable Dapat Dipantau
1.	Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan Bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan pelindungan Bahasa dan sastra daerah	Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah orang yang ikut berperan serta dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra. Partisipan yang dimaksud adalah siswa, guru, komunitas, dan masyarakat pemilik tradisi.	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan Sastra terus meningkat.	Peningkatan jumlah partisipan pelindungan Bahasa dan sastra dapat dicapai melalui kerja sama dengan komunitas sastra, dinas pendidikan dan kebudayaan, serta pemerintah daerah. Pemberdayaan penutur jati yang hanya menguasai bahasa daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target kegiatan pelindungan.	Partisipan pelindungan adalah pembina komunitas sastra, siswa SD dan SLTP, dan guru pengampu mata pelajaran muatan lokal, sedangkan sastra lisan adalah bagian dari muatan lokal tersebut.	Pelaksanaan kegiatan pelindungan mengikuti mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, termasuk waktu atau durasi pelaksanaannya.	Bertambahnya jumlah partisipan pelindungan an bahasa dan sastra dapat dipantau melalui peningkatan jumlah komunitas sastra, peningkatan jumlah siswa dan guru yang menguasai sastra lisan dan peningkatan kesadaran masyarakat

										terhadap sastra lisan.
2.	Perkamusan dan Peristilahan	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk pengembangan bahasa dan sastra dalam bidang leksikografi adalah berupa kamus. Baik kamus cetak maupun kamus digital.	Terbitnya kamus digital dan pengembangan program kamus digital. Selain itu, pengayaan kosakata Bahasa Indonesia semakin bertambah dari Bahasa daerah (Mentawai dan Minangkabau)	Produk leksikografi (kamus), dapat terwujud melalui tahapan yang cukup lama dan sistematis. Tahapan yang harus dilalui adalah identifikasi, verifikasi, lokakarya, dan sidang komisi. Disetiap tahapan akan menghadapi tantantangan yang beragam. Salah satu tantangan yang cukup sulit adalah memahami kebahasaan (fonologi, morfologi, sintaksis, simantik) dan menjalin kerja sama yang erat	Partisipan kamus adalah penutur Bahasa jati, aparat pemerintah, ilmuan, dan masyarakat. Semua komponen tersebut sangat berperan dalam penyusunan produk leksikografi	Pelaksanaan kegiatan perkamusan dilakukan sesuai juknis atau ketentuan yang telah ditetapkan KKLK dan Pusbanglin. Seluruh Rangkaian kegiatan, pengayaan dan pengembangan kamus, dilaksanakan selama 10 bulan	Produk leksikografi dapat dipantau dengan wujud produk berupa kamus cetak dan kamus digital. Untuk kamus digital dapat dilihat dari penambahan data kamus dan pengembanapli kasi kamus digital	

						dengan pemerintah daerah pengambilan data (entri). Selain tantangan teknis, aspek geografi yang sulit dan transportasi yang tidak terjadwal juga menjadi tantangan untuk melahirkan produk leksikografi yang bermutu			
3.	Pembinaan Bahasa dan Hukum	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan 2. Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	1. Jumlah penutur bahasa terbina melalui literasi kebahasaan dan kesastraan 2. Jumlah lembaga terbina penggunaan bahasanya	1. Jumlah penutur bahasa terbina melalui literasi kebahasaan dan kesastraan. Penutur yang dimaksud adalah tenaga profesional dan calon tenaga profesional. 2. Jumlah lembaga terbina penggunaan bahasanya. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta.	1. Jumlah penutur bahasa terbina yang terus meningkat 2. Jumlah lembaga terbina yang terus meningkat.	Peningkatan jumlah penutur bahasa terbina dan jumlah lembaga terbina dapat dicapai melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga swasta.	Penutur bahasa terbina yang dimaksud adalah guru, siswa, tenaga persuratan, wartawan, pegawai atau pejabat pemerintah, Sedangkan	Pelaksanaan kegiatan penutur terbina dan lembaga terbina mengikuti mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pusat Pengembangan dan	Bertambahnya jumlah penutur bahasa terbina dan lembaga terbina dapat dipantau melalui jumlah peserta kegiatan.

							<p>lembaga terbina yang dimaksud adalah lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta yang dijadikan lembaga binaan Balai bahasa Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>Pembinaan Bahasa, termasuk waktu atau durasi pelaksanaannya.</p>	
4.	Literasi	<p>1. Meningkatkan partisipasi komunitas literasi dalam program literasi</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan</p>	<p>1. Jumlah komunitas literasi terbina dalam program literasi</p> <p>2. Jumlah generasi muda melalui literasi kebahasaan dan kesastraan</p>	<p>Partisipan literasi adalah pengelola/pemilik TBM, pegiat literasi, komunitas literasi, dan generasi muda yang terbina melalui program/gerakan literasi seperti duta bahasa</p>	<p>1. Jumlah komunitas literasi yang terbina terus meningkat</p> <p>2. Jumlah generasi muda yang terbina terus meningkat</p>	<p>Peningkatan jumlah komunitas literasi terbina dan jumlah generasi muda terbina dapat dicapai melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas</p>	<p>Komunitas literasi yang dimaksud adalah TBM, Pojok Baca, Perpustakaan, kreator konten literasi, dan pegiat literasi</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan literasi mengikuti mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pusat Pengembangan dan</p>	<p>Bertambahnya jumlah partisipan literasi dapat dipantau peningkatan jumlah komunitas literasi, peningkatan jumlah duta</p>

						Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, FPL, dan FTBM	lainnya. Generasi muda yang dimaksud adalah duta bahasa, pelajar, dan mahasiswa yang dibina melalui gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan Balai Bahasa Sumatera Barat.	Pembinaan Bahasa melalui juknis KKLP Literasi, termasuk waktu atau durasi pelaksanaannya.	bahasa, pelajar, dan mahasiswa yang aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan literasi
5.	UKBI	Meningkatnya kemahiran berbahasa Indonesia pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Jumlah peserta tes UKBI	Peserta Tes UKBI bertambah jumlahnya dari berbagai kalangan, yaitu pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pemangku kepentingan dan kepolisian.	Jumlah peserta tes UKBI	Meningkatnya jumlah peserta UKBI dapat dilakukan dengan koordinasi dan sosialisasi UKBI bagi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan,	Partisipan peserta tes UKBI adalah pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pemangku kepentingan dan kepolisian.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan tes UKBI mengikuti mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Balai Bahasa Provinsi	Meningkatnya kemahiran berbahasa Indonesia pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dapat dipantau dari jumlah peserta yang mengikuti tes UKBI dan skor UKBI yang

						<p>Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SLTP dan SLTA, Dekan, serta Kepala Pusat Bahasa. Para pemangku kepentingan inilah diharapkan membuat keputusan untuk mewajibkan guru, siswa, dosen, dan mahasiswa wajib mengikuti UKBI. Inilah tantangan terbesar kami dalam mendorong para pemangku kepentingan untuk menghasilkn keputusan tersebut.</p>		Sumatera Barat dan KKLP UKBI, termasuk waktu atau durasi pelaksanaannya.	didapat.
6.	BIPA	Meningkatnya partisipasi	Jumlah Lembaga	Lembaga penyelenggara BIPA adalah Lembaga	Jumlah Lembaga penyelenggara	Peningkatan jumlah Lembaga	Lembaga penyelengg	Pelaksanaan kegiatan	Bertambahnya jumlah

		masyarakat dalam penyelenggaraan program BIPA baik dalam maupun luar negeri	penyelenggara program BIPA dan pemelajar BIPA	yang melaksanakan program BIPA, yaitu melaksanakan pembelajaran BIPA kepada WNA. Pemelajaran BIPA orang asing yang Bahasa Indonesia tujuan tertentu.	program BIPA dan jumlah WNA yang belajar Bahasa Indonesia.	penyelenggara program BIPA dapat melalui kerja sama dengan Lembaga pemerintah, swasta, komunitas, masyarakat, dan individu dalam rangka meningkatkan partisipasi mereka dalam mencapai target internasionalisasi Bahasa Indonesia.	ara program BIPA adalah lembaga yang memberilakan layanan pembelajaran Bahasa Indonesia kepada WNA. Sedangkapa n pemelajaran BIPA adalah mereka yang belaiar bahasa Indonesia untuk tujuan tertentu, seperti pelajar, ekspatriat, dan lain-lain.	fasilitasi program BIPA mengikuti mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pusat Penguatan dan Pemberdayaa n Bahasa, termasuk waktu atau pelaksanaannya.	Lembaga penyelenggara program BIPA Dapat dipantau melalui peningkatan jumlah lembaga penyelenggara. Peningkatan umlah pemelajar asing (WNA) belajar Bahasa Indonesia.
7.	Penerjemahan	Tersediannya produk terjemahah berbahasa daerah	Jumlah produk terjemahan berbahasa daerah	Produk terjemahan berbahasa daerah Minangkabau sebanyak 13 naskah dan berbahasa daerah	Jumlah produk terjemahan berbahasa daerah Minangkabau	Penerjemahan dari bahasa daerah Mentawai ke bahasa	Penerjemahan cerita berbahasa daerah melibatkan	Pelaksanaan kegiatan terjemahan berbahasa daerah	Produk terjemahan berbahasa daerah dapat dipantau

				Mentawai sebanyak 10 naskah	dan Mentawai semakin bertambah	Indonesia memerlukan keahlian khusus karena penyunting dan penyalaras akhir bukan penutur jati bahasa Mentawai. Selain itu, penulis dan penerjemah tidak memiliki kemampuan yang memadai tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga kerja tim dan penyunting menjadi lebih intens.	beberapa unsur, seperti penulis, penerjemah, penelaah, penyunting, ilustrator, dan penyalaras akhir. Semua komponen tersebut sangat berperan dalam penyusunan produk terjemahan. Selain itu, produk terjemahan ditujukan untuk anak usia 10--13 tahun (Pembaca Semenjana Jenjang C) sangat relevan	dilakukan sesuai juknis dan ketentuan KKLP Penerjemahan dan mengikuti mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, termasuk waktu atau pelaksanaannya.	dengan wujud produk berupa 13 produk terjemahan berbahasa Minangkabau dan 10 produk terjemahan berbahasa daerah Mentawai
--	--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

							dengan peningkatan bahan bacaan untuk anak usia sekolah.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Padang, 14 Juli 2023

Kepala Balai Bahasa Provinsi
Sumatera Barat



Dr. Eva Krisna

NIP. 196707161998022001

POHON KINERJA
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	RO	KOMPONEN	
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1 Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	3.1.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2021.DDA.001	Produk kodifikasi bahasa	52. Pemerikayaan Kosakata 53. Pengembangan Kamus
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.3 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	54. Peningkatan Kemahiran Berbahasa 55. Peningkatan Apresiasi Sastra
						2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	52. Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka
			3.1.2 Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1.2.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	51. Pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi 52. Pembinaan Literasi Generasi Muda
						2022.BDB.001	Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan	51. Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum 53. Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik
						2022.BDB.002	Komunitas penggerak literasi terbina	51. Pemutakhiran Profil Komunitas Penggerak Literasi 52. Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi
	3.1.3 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	3.1.3.1 Jumlah pemelajar BIPA	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	3.1.3.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	6702.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	54. Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA
				Tersedianya produk diplomasi bahasa	3.1.3.2 Jumlah produk penerjemahan	6702.DDA.002	Produk Penerjemahan	52. Pelaksanaan Penerjemahan
	3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	3.2.8 Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	3.2.8.2 Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra	2021.QDC.001	Partisipan perlindungan bahasa	-
						2021.QDC.002	Partisipan perlindungan sastra	51. Koordinasi Antarinstansi dalam Rangka Implementasi Model Pelindungan Sastra Daerah 52. Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah
Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	5.3.11 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.3.11.1 Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	2020.EBA.962	Layanan Umum	51. Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan 52. Pelayanan Perpustakaan (Dukungan Sarpras) 53. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 54. Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 56. Pelayanan SDM 57. Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 58. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi 59. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	RO	KOMPONEN
	5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.4.10 Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.4.10.1 Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2020.EBA.994 Layanan Perkantoran 2020.E88.951 Layanan Sarana Internal 2020.E88.971 Layanan Prasarana Internal	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor



Matrik Perubahan Indikator Kinerja Renstra (Semula-Menjadi)

SEMULA								MENJADI								
Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana	Program/K egiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					lini dasar (2020)	2021	2022	2023	2024
2021 KEGIATAN: BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA BARAT								2021 KEGIATAN: BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA BARAT								
SK 2	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia							SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra							
IKK 2.1	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	500	500	500	500	500	IKK 3.1.1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	1	1	2	2	2	
								SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra							
								IKK 3.2.8.1	Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra	model	-	0	0	0	0	
								IKK 3.2.8.2	Jumlah partisipasi perlindungan bahasa dan sastra	orang	22	22	22	23	23	
2022 KEGIATAN: PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA								2022 KEGIATAN: PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA								
SK 1	Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik							SK	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan							
IKK 1.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	230	258	258	34	34	IKK 3.1.2.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga			45	45	45	
SK 3	Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina							IKK 3.1.2.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	-	20	15	15	15	
IKK 3.1	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	900	704	878	900	900	6702 KEGIATAN: Penguatan Diplomasi Kebahasaan								
								SK	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA							
								IKK 3.1.3.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	25	25	55	55	55	
								SK	Tersedianya produk diplomasi bahasa							
								IKK 3.1.3.2	Jumlah produk penerjemahan	produk	2	2	4	23	23	
2020 KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA BARAT								2020 KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BALAI BAHASAPROVINSI SUMATERA BARAT								
SK 1	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat							SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa							
IKK 1.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	BB	BB	IKK 5.3.11.1	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	69,7	72,7	75,7	78,8	81,8	
IKK 1.3	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	nilai	91	91	91	91	91									

DEFINISI OPERASIONAL 2022--2024			
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA BARAT			
Sk	: [K1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra		
IK K	: [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih mehuas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.</p> <p>Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra).</p> <p>Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.</p>	<p>Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat pada tahun tertentu.</p> <p>Satuan: Produk</p> <p>Tipe Penghitungan: kumulatif</p>	<p>Laporan Internal</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p> <p>Penanggung jawab: KKLP</p> <p>Kamus dan Peristilahan</p>
SK			
IK K	: [SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan		
	: [IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data

SK	<p>Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peringkat apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.</p> <p>Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.</p> <p>Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p>Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.</p>	<p>Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut</p> $JPT = \sum P$ <p>Keterangan: JPT = Jumlah Penutur terbina P= Peserta kegiatan</p> <p>Satuan: Orang Tipe Penghitungan: kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung jawab: KKLP Literasi dan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum</p>
IK K	: [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan		
	: [IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data
SK	<p>Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.</p> <p>Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).</p> <p>Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.</p>	<p>Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Balai bahasa Provinsi Sumatera Barat. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $JLT = \sum L$ <p>Keterangan: JLT = Jumlah lembaga terbina L= Lembaga yang dibina Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung jawab: KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum</p>
IK K	: [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan		
	: [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data
SK	<p>Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa.</p> <p>Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat.</p>	<p>Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Satuan: lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung jawab: KKLP Literasi</p>

	Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.		
IK K	: [SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA		
	: [IKK 4. 1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data
SK	Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri. Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.	Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantur bahasa) melalui lembaga. Satuan: orang Tipe penghitungan: Kumulatif	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung jawab: KKLP BIPA
IK K	: [SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa		
	: [IKK 5. 1] Jumlah produk penerjemahan		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data

SK	<p>Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajuan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p>	<p>Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Satuan: Produk Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung jawab: KKLP Penerjemahan</p>
IK K	:[SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah		
	:[IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data

	<p>Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa. Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.</p> <p>Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.</p> <p>Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.</p>	<p>Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.</p> <p>$A = B + C$</p> <p>Keterangan: A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa C = Jumlah partisipan perlindungan sastra</p> <p>$B - M + N$</p> <p>Keterangan: B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa</p> <p>$C = X + Y$</p> <p>Keterangan: C = Jumlah partisipan perlindungan sastra X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra</p> <p>Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung jawab: KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra.</p>
	Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.		
	Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa		
SK	Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.		
IK K	: [SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat		

	:[KK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data
SK	<p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.</p> <p>Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).</p>	<p>Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]</p> <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	<p>Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p> <p>Penanggung Jawab: Layanan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Layanan SDM.</p>
IK K	:[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat		
	:[KK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat		
	Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>Kinerja Anggaran dalam PMK No 214 / FMK 02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.</p> <p>Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) <p>IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%</p> <p>Bobot masing-masing variabel pada aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA (40%) + Nilai EKA (60%) Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:</p> <p>Nilai Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> >90% Sangat Baik >80%-90% Baik >60%-80% Cukup >50%-60% Kurang <50 Sangat Kurang <p>Satuan: Nilai Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SMART DJA (EKA) 2. Aplikasi OM SPAN (IKPA) <p>Penanggung jawab: Layanan Perencanaan, Layanan Keuangan, Layanan Monitoring dan Evaluasi, Layanan BMN</p>
	<p>Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan</p>		

Padang, 14 Juli 2023

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Krisna', is written over the official stamp.

Eva Krisna
NIP196707161998022001